



EKSISTENSI ADAT, TANAH ULAYAT DAN PARIWISATA DI KASEPUHAN CIPTAGELAR, JAWA BARAT

Tri Suyud Nusanto¹ dan Nur Widiyanto²

¹Prodi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, Indonesia

²Prodi S2 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta, Indonesia

Email: nwidiyantostipram@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai dinamika dari pertemuan antara Islam dengan *tatali paranti karuhun* sebagai dasar spiritualitas dan praktek kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar yang menempati kawasan Taman Nasional Halimun Salak, Jawa Barat. Fokus dari studi ini adalah terkait bagaimana aspek legal dari hak menjalankan kepercayaan adat dan akses atas tanah ulayat bisa secara bertahap didapatkan melalui keterlibatan dalam pengembangan pariwisata. Spiritualitas dan kehidupan sehari-hari warga *kasepuhan* bersumber dari kepercayaan Sunda Pra-Islam, dan dikenal sebagai bagian dari kepercayaan Sunda Wiwitan. Seperti halnya berbagai kepercayaan adat lain di Indonesia, Sunda Wiwitan tidak dikategorikan sebagai agama resmi oleh negara. Pada sisi lain, meskipun telah menempati wilayah adat secara turun temurun, namun setelah ditetapkan sebagai bagian dari taman nasional, penduduk Ciptagelar sempat dianggap sebagai penghuni ilegal di kawasan hutan konservasi. Hal ini menjadikan adanya dua tekanan sekaligus bagi warga *kasepuhan*, yaitu keleluasan untuk menjalankan spiritualitas yang berakar dari ajaran nenek moyang dan terpinggirnnya atas hak tanah adat dari sisi legal. Pada saat yang sama, Ciptagelar juga memiliki berbagai sumberdaya wisata budaya yang bersumber dari keaslian tradisi Sunda, serta wisata alam di kawasan pegunungan. Untuk itu, studi ini memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana hadirnya pariwisata dapat menjadi jalan tengah bagi upaya memperkuat identitas budaya Kasepuhan Ciptagelar serta mendapatkan pengakuan bagi hak atas tanah ulayat. Riset etnografi dengan *participant observation* untuk pengumpulan data ini memperlihatkan bahwa pariwisata ternyata dapat memediasi berbagai kebuntuan dari dinamika antara Islam, adat dan upaya memperkuat akses untuk menempati tanah ulayat yang telah ditetapkan sebagai bagian dari hutan negara.

Keywords: *Kasepuhan Ciptagelar, Islam, adat, pariwisata, identitas*

ADAT, CUSTOMARY LAND AND TOURISM IN KASEPUHAN CIPTAGELAR, WEST JAVA.

ABSTRACT

The article aimed at understanding the dynamics within the encounter between Islam and tatali paranti karuhun, the local religion as the central source of spirituality and cultural practices of Kasepuhan Ciptagelar living on the Halimun Salak National park, West Java. The tradition is rooted in Pre-Islamic Sundanese culture that is often placed as the part of Sunda Wiwitan belief, which is, as the other local beliefs in Indonesia, not being recognized as the official religion. On the other hand, although have been inhabiting the area for



hundred years the establishment of national park have placed the people as the illegal settler within the state's forest. Thus, there are two pressures for the people; the freedom to practice their local tradition rooted in a local belief which is different from the majority group and the limited legal access toward their customary land. Fortunately, Kasepuhan Ciptagelar is blessed by various tourism resources, both in the term of eco-tourism and cultural tourism rooted in the authenticity of Sundanese culture. In this case, the study offers new insight that the arrival of tourism has given the opportunity for the people to strengthen their cultural identity and the legal access toward the customary land. The ethnographic research through participant observation to gather the primary data reveals that tourism has effectively mediated the encounter between Islam, local belief and the struggle to re-claim the customary land.

Keywords : *Kasepuhan, Islam, adat, tourism, identity*

Copyright ©2021. UHN IGB Sugriwa Denpasar. All Right Reserved

I. PENDAHULUAN

Masyarakat adat sering disebut sebagai salah satu kelompok yang paling termarginalkan di Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, hak menjalankan agama hingga pelayanan atas berbagai hak sebagai warga negara. Meski demikian, dalam beberapa dekade terakhir masyarakat adat juga dianggap mulai menemukan jalan untuk memperkuat identitas budayanya. Kebangkitan adat di Indonesia tersebut tidak lepas dari empat hal yang mendukung; pengaruh gerakan internasional atas hak masyarakat adat, demokratisasi politik di Indonesia pasca Orde Baru, dan sejarah panjang eksistensi masyarakat adat serta berbagai strategi bertahan yang dibangun (Henley and Davidson, 2008).

Selama masa penjajahan Belanda, berbagai pandangan negatif terhadap masyarakat adat disematkan dengan tujuan untuk memperkuat kontrol terhadap mereka (Peluso and Vandergeest, 2001). Hal yang sama juga dilanjutkan oleh pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan dengan motif untuk memperkuat ambisi pertumbuhan ekonomi, dimana kelompok masyarakat tradisional sering ditempatkan sebagai penghambat kemajuan (Dove, 1985; Li, 2000). Lebih jauh, kehidupan budaya dan spiritualitas masyarakat adat yang berbeda dengan ajaran agama resmi, terutama Islam atau Kristiani sering menjadi dasar untuk menempatkan berbagai kelompok masyarakat

adat sebagai kelompok animisme atau bahkan “sesat”.

Di Jawa Barat, Kasepuhan Ciptagelar, adalah salah satu kelompok masyarakat adat Sunda yang masih menjalankan cara hidup dan praktek budaya sesuai dengan masyarakat Sunda pra-Islam. Berbagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk Ciptagelar mengikuti aturan adat yang bersumber dari *tatali paranti karuhun* atau ajaran dari nenek moyang (Adimiharja, 1992). Hal ini sering menjadi dasar dari beberapa pihak untuk menyebut bahwa praktek budaya Kasepuhan Ciptagelar sebagai Sunda Wiwitan. Disinilah titik awal munculnya berbagai perbedaan dan ketegangan dengan masyarakat Sunda disekitarnya yang sudah menganut kepercayaan dan praktek Islam (Widiyanto, 2019).

Kasepuhan Ciptagelar secara administratif terletak di Desa Sirnaesmi, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi. Area pemukiman dan tanah adat kelompok ini bersinggungan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Halimun Salak. Masyarakat setempat meyakini bahwa sejarah *kasepuhan* berakar sejak tahun 1368, dimana *seren taun*, salah satu upacara adat paling penting di Ciptagelar dimulai. Penduduk Kasepuhan Ciptagelar berjumlah sekitar 150 KK, dan tinggal di Ciptagelar sebagai “*lembur jero*”, atau “kampung dalam” sekaligus sebagai pusat kebudayaan dari Kesatuan Adat Banten Kidul yang lebih luas dan dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut *Abah*. Ciri khas secara

fisik dari kampung inti ini terletak pada pemukiman yang tersusun dari bangunan tradisional dari kayu yang beratap ijuk, berbeda dengan “kampung luar” yang menggunakan bahan beton dengan atap dari bahan lebih modern. Lebih jauh, anggota keseluruhan dari masyarakat *kasepuhan* diukur dari pengakuan terhadap Abah sebagai pemimpin adat mencapai sekitar 30.000 orang dari 569 desa di Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Lebak di Provinsi Banten.

Dalam beberapa dekade terakhir, Kasepuhan Ciptagelar telah terkoneksi dengan kegiatan wisata dengan tujuan untuk memperkuat identitas budaya *kasepuhan*, sekaligus sebagai salah satu alternatif memperkuat akses dibidang ekonomi. Upaya ini tidak lepas dari berbagai tekanan terhadap *kasepuhan*, terutama terkait dengan hak atas tanah adat serta keleluasan untuk menjalankan spiritualitas yang bersumber dari ajaran *karuhun* atau leluhur. Dari sisi tanah adat, penetapan kawasan Gunung Halimun sebagai taman nasional pada 26 Februari 1992 menjadi titik balik dari ketidakjelasan hak atas tanah adat bagi *kasepuhan* dari sisi legal aspek, dilanjutkan dengan perluasan kawasan taman nasional pada tahun 2003 yang memasukkan seluruh area pemukiman, persawahan dan hutan adat kasepuhan ke dalam kawasan konservasi tersebut.

Selain tanah adat sebagai sumber spiritualitas masyarakat *kasepuhan*, keleluasan untuk menjalankan praktek beragama sesuai dengan tradisi leluhur juga mendapatkan tekanan. Meskipun secara administratif beragama Islam, namun beberapa praktek Islam yang mendasar diartikan secara berbeda di *kasepuhan*. Hal ini memunculkan anggapan kuat dari masyarakat di sekitar Ciptagelar yang mayoritas beragama Islam bahwa praktek “Islam” di Kasepuhan Ciptagelar dianggap tidak sama, Islam yang tidak shalat atau masih bercampur dengan animisme (Widiyanto, 2019; 93). Pada saat yang sama, dari sisi legal aspek, UU No.1/PNPS/1969 yang menegaskan bahwa hanya 5 agama resmi yang diakui oleh negara menjadikan praktek spiritualitas kelompok adat rentan disebut sebagai ajaran yang

“menyimpang”, termasuk di Kasepuhan Ciptagelar.

Pada sisi lain, paper ini menggunakan ide utama bahwa kelompok minoritas tidak pasif dalam menghadapi berbagai tekanan dari luar. Sebaliknya, mereka secara aktif membangun strategi untuk bertahan dengan berbagai taktik untuk menjawab permasalahan penting yang diajukan; bagaimana pariwisata berperan dalam upaya penduduk Kasepuhan Ciptagelar mempertahankan identitas budaya yang berakar pada ajaran leluhur serta menguatkan pengakuan atas tanah ulayat ?. Dalam paper ini teori dramaturgi dari Goffman (1990) digunakan untuk mempelajari resistensi masyarakat kasepuhan, baik terhadap tekanan dari sisi *keagamaan* maupun berkurangnya akses serta pengakuan terhadap tanah ulayat. Disinilah, teori “*frontstage*” dan “*backstage*” dari Goffman akan menjadi kunci untuk menjawab tujuan penulisan artikel ini yaitu menemukan keterkaitan antara pengembangan pariwisata di Kasepuhan Ciptagelar dengan upaya memperkuat identitas budaya kasepuhan serta akses legal terhadap tanah ulayat yang telah menjadi bagian dari kawasan taman nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Kasepuhan Ciptagelar sering ditempatkan sebagai bagian dari kelompok masyarakat Sunda di Jawa Barat yang masih mempraktekkan cara hidup tradisional pra-Islam dan beberapa pihak menyebutnya sebagai bagian dari kelompok Sunda Wiwitan. Studi Mutaqqin (2014) menunjukkan bahwa kelompok Sunda Wiwitan lain di Kuningan, Jawa Barat yang dikenal sebagai Agama Djawa Sunda (ADS) juga mengambil strategi non-konflik dengan memeluk Islam, namun di belakang praktek adat tetap menjadi dasar spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, dalam *setting* social masyarakat Jawa, relasi antara praktek adat Jawa dengan kedatangan ajaran Islam memunculkan segmentasi dari masyarakat Islam-Jawa yang merujuk kepada penerimaan terhadap sinkretisme sebagai salah satu dasar dari spiritualitas masyarakat Jawa (Susilo, 2016).

Pada sisi lain, studi Picard (1996) dan Nordholt (2007) di Bali menunjukkan bahwa pada satu sisi pariwisata bisa menjadi jalan bagi penguatan identitas adat dan budaya masyarakat Bali, dengan konsekuensi pada akhirnya antara budaya, agama dan pariwisata menyatu dan dikenal dengan istilah “budaya pariwisata”. Demikian juga studi Widiyanto dan Agra (2019) di Sabah, Malaysia yang menunjukkan bahwa berkembangnya pariwisata di Gunung Kinabalu menjadi jalan terhadap “*half-hearted revivalism*” dari Momolianism, agama lokal masyarakat Dusun beserta berbagai konsekuensi yang muncul, termasuk mudahnya budaya agraris karena berpindah ke berbagai aktifitas yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Disini, keterlibatan masyarakat adat dan kelompok minoritas ke dalam kegiatan pariwisata tidak hanya terkait dengan kepentingan untuk mendapatkan akses terhadap benefit ekonomi dari pasar pariwisata, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya tertentu yang terpinggirkan oleh kelompok dominan.

Sementara, studi tentang masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dalam beberapa dekade terakhir didominasi oleh isu tentang keberhasilan pola pertanian tradisional, ketahanan pangan dan upaya memperkuat pengakuan terhadap hak ulayat (Kusdiwanggo, 2016; Darjanto, 2015). Disinilah paper ini ingin melengkapi studi tentang bagaimana dinamika antara agama resmi, praktek adat yang bersumber dari tradisi leluhur serta kegiatan pariwisata di Ciptagelar telah menjadi jalan bagi transformasi masyarakat adat untuk terkoneksi dengan modernitas.

METODE

Studi ini menggunakan metode etnografi untuk mendalami bagaimana persektif dari masyarakat di Kasepuhan Ciptagelar dalam merespon berbagai tekanan terkait aspek keagamaan maupun hak atas tanah adat. Lokasi penelitian adalah di Kasepuhan Ciptagelar, yang masuk wilayah Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah ini adalah pusat dari kelompok masyarakat adat Kasepuhan Banten Selatan yang masih terhubung secara kultural

dengan masyarakat Badui di Provinsi Banten. dan alat analisis utama adalah interpretasi terhadap berbagai simbol dan makna yang muncul dalam keseluruhan interaksi selama *fieldwork* (Spradley, 1997).

Data primer dikumpulkan dengan participant observation, termasuk wawancara mendalam selama melakukan *field work* berseri dari tahun 2016 hingga 2019, dilengkapi dengan data arsip dari berbagai sumber. Informan dipilih dengan teknik *snowball*, dimana informan kunci dipilih berdasarkan representasi serta kedekatan terhadap isu yang diteliti. Sementara, observasi difokuskan pada aktifitas sehari-hari, baik individu maupun kelompok serta berbagai kegiatan komunal yang terkait dengan adat, agama maupun pariwisata. Hasil observasi tersebut ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam untuk mengklarifikasi beberapa aspek yang dianggap memiliki relevansi kuat dengan isu penelitian yang dipilih.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedatangan Islam di Tanah Sunda

Kedatangan ajaran Islam di nusantara disebut terjadi setelah sekian lama Hindu dan Buddha hadir dan bercampur dengan berbagai tradisi lokal sehingga proses perpindahan ini disebut tidak lengkap (Ricklefs, 2012). Sementara, Islam sendiri hadir ke nusantara bersamaan dengan merebaknya berbagai jalur perdagangan dimana Kepulauan Indonesia adalah salah satu perlintasan dagang penting dimasa lalu (Pringle, 2010: 29). Sementara itu, di Jawa Barat yang dikenal dengan *landscape* budaya Sunda-nya, kehadiran ajaran Islam tidak lepas dari pergeseran kekuasaan politik dari Majapahit ke Demak Islam di pesisir utara Jawa Tengah di era 1400 an (Reid, 1993). Hal ini disebut sebagai menjadi titik awal dari proses Islamisasi secara keseluruhan di Pulau Jawa dimana peran “wali sanga”, kelompok perintis penyebaran Islam melalui jalur politik menjadi salah satu kuncinya.

Kehadiran Islam di Jawa Barat terjadi pada saat Pakuan-Pajajaran, kerajaan dengan corak adat Sunda masih eksis di era 1500-an. Periode kejatuhan Pajajaran tidak lepas dari menguatnya Islamisasi di pesisir Jawa Barat

yang ditandai dengan munculnya Kesultanan Banten serta Cirebon yang terhubung dengan Demak (Achmad, 2017). Aliansi Banten dan Demak berkontribusi penting dalam kejatuhan Pajajaran yang ditandai dengan direbutnya Sunda Kelapa oleh kekuatan Islam dari pantai utara. Kejatuhan Sunda Kelapa di tahun 1527-an menjadikan pusat kekuatan Pajajaran terpecah. Sebagian pengikut Pajajaran bergerak ke Priangan dan mendirikan Sumedang Larang, sementara sebagian lain Pajajaran bergerak ke pedalaman Gunung Halimun. Sumedang Larang sendiri pada akhirnya “jatuh” dan menjadi *vassal* dari Mataram Islam di era Sultan Agung. Kelompok terakhir inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat Badui dan kelompok Kasepuhan Banten Selatan, termasuk di Ciptagelar yang sering disebut sebagai penjaga adat dan tradisi masyarakat Sunda dari masa Pajajaran.

Jatuhnya Pajajaran, diikuti Sumedang Larang memberikan jalan bagi proses Islamisasi secara bertahap di wilayah Jawa Barat saat ini secara keseluruhan. Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, wilayah Jawa Barat kemudian dikenal sebagai wilayah masyarakat Sunda dengan budaya Islam yang kental sebagai hasil proses Islamisasi yang sudah dimulai sejak jatuhnya Pajajaran. Di era Indonesia pasca kemerdekaan, gelombang kedua proses “agamanisasi” berbagai kepercayaan berbasis adat muncul dengan diterbitkannya UU.No 1/PNPS/1969 dimana hanya ada lima agama resmi yang diakui oleh negara. Berbagai agama lokal dan kepercayaan adat yang menjadi kunci berbagai kehidupan spiritual dan budaya kelompok adat hanya ditempatkan sebagai “kepercayaan”. Hal ini mendorong migrasi besar-besaran penganut agama adat untuk memeluk salah satu agama resmi karena tanpa memiliki “agama resmi” pemenuhan berbagai hak sebagai warga negara juga akan menemui hambatan. Di Jawa Barat, sebagian besar penganut adat kemudian memeluk Islam meskipun sebagian kecil ada yang menjadi Katholik seperti para penganut Madraism di Kuningan (Steenbrink, 2005).

Sementara, di Kasepuhan Ciptagelar, Islam telah dipilih sebagai agama administratif meskipun praktek beragama yang dilakukan

berbeda dengan Islam mayoritas di luar wilayah *kasepuhan*. Ki Amil, salah satu tetua adat yang lahir sekitar 1940-an menyatakan bahwa secara administratif sejak kecil sudah memeluk Islam. Meski demikian, berbagai ritual mendasar seperti shalat dan puasa tidak dilakukan secara rutin seperti dengan penganut Islam yang lain. Pada sisi lain, ajaran leluhur serta berbagai ritual berdasarkan adat justru menjadi praktek yang secara individual maupun komunal rutin dijalankan. Berbagai ritual tersebut terutama yang terkait dengan siklus pertanian padi secara tradisional yang setiap tahapan akan ditandai dengan upacara adat tertentu. Hal inilah yang kemudian memicu berbagai stigma terhadap spiritualitas masyarakat di Kasepuhan Ciptagelar, sekaligus memunculkan berbagai upaya “pemurnian” praktek beragama oleh berbagai kelompok Islam dari luar.

Dinamika Islam dan Adat

Meskipun secara administratif warga *kasepuhan* memeluk Islam, namun dalam praktek sehari-hari mereka lebih untuk menjalankan ajaran nenek moyang yaitu *tatali paranti karuhun*. Oleh beberapa pihak dari luar, ajaran spiritualitas ini sering ditempatkan sebagai bagian dari Sunda Wiwitan, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai kepercayaan Sunda awal sebelum bercampur atau digantikan dengan agama dari luar. Kepercayaan leluhur ini juga sering disebut sebagai “agama karuhun” dan bertumpu kepada keyakinan bahwa dunia terbagi menjadi *macro-cosmos* (dunia besar) dan *micro-cosmos* (dunia kecil) serta dunia sakral serta fana. Dunia sakral yang tidak terlihat dan dunia fana saling terkait satu sama lain sehingga prinsip hidup yang dipraktikkan adalah dengan menjaga harmoni serta keseimbangan antara manusia, arwah leluhur (*karuhun*), berbagai makhluk hidup baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat serta dengan lingkungan tempat hidup mereka (1992: 36). Pandangan inilah yang menjadi dasar dari praktek kehidupan sehari-hari yang terus dijaga di Kasepuhan Ciptagelar, sehingga hampir seluruh awal untuk kegiatan pertanian, membangun rumah, melakuka upacara adat hingga bermain bola ke luar kampung harus dimulai dengan ijin dari sesepuh adat serta ritual untuk meminta “ijin” dari *karuhun*.

Disini, praktek agama leluhur ini kemudian termanifestasi ke dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak memerlukan ritual tertentu seperti yang biasa dilakukan dalam Islam. Secara singkat, *tatali paranti karuhun* dapat ditempatkan sebagai bagian dari kepercayaan Sunda Wiwitan, sekaligus sebagai penanda bagi masyarakat Sunda yang masih mempraktekkan ajaran leluhur atau belum sepenuhnya berpindah ke agama dunia yang datang dari luar seperti Islam atau Kristiani. Sementara, istilah Sunda Wiwitan sendiri muncul dari Pangeran Djatikusuma, pemimpin ketiga dari kelompok Sunda Wiwitan di Kuningan Jawa Barat yang awalnya ditujukan untuk keluar dari dominasi budaya Jawa yang ada di dekat daerah tersebut (Mutaqin, 2014: 2).

Mengikuti cara hidup leluhur yang dekat dengan lingkungan sekitar, menjaga tradisi tertentu agar tidak berubah seperti rumah beratapkan ijuk, bertanam padi secara tradisional dengan masa panen setahun sekali adalah aplikasi dari ajaran *tatali paranti karuhun*. Hal ini oleh Bird David (1999) disebut sebagai *relational epistemology* yang berarti memberlakukan lingkungan hidup seisinya baik benda mati maupun benda hidup sebagai makhluk yang setara, dan menjadi dasar hubungan harmonis antara masyarakat adat dengan lingkungan hidup. Di Ciptagelar, praktek ini termanifestasi ke dalam berbagai ritual untuk menghormati leluhur, berterimakasih kepada Dewi Pohaci (Dewi Padi) sebagai sumber penghidupan serta meminta keselamatan dalam hidup bagi masyarakat lebih luas (Suganda, 2013; 55).

Kedekatan dengan lingkungan sekitar berupa hutan, sungai, makam dan situs leluhur, pemukiman serta praktek pertanian tradisional melalui berbagai ritual ini kemudian menjadi dasar bagi sebagian penganut Islam di luar Kasepuhan Ciptagelar untuk menganggap bahwa praktek Islam mereka bercampur dengan animism, atau lebih jauh hanya sebagai kedok. Lebih lanjut, hal ini diikuti oleh berbagai tindakan tertentu dengan mengirimkan sekelompok pendakwah ke Ciptagelar untuk “meluruskan” praktek Islam yang dianggap menyimpang. Pada sisi lain, masyarakat

Ciptagelar yang memiliki prinsip hidup “menjaga keseimbangan” tidak pernah secara terbuka dan dengan kekerasan menolak kedatangan kelompok pendakwah tersebut, melainkan tetap diterima meskipun juga tetap konsisten untuk mempraktekkan Islam dengan cara sendiri.

Disinilah, teori panggung atau dramaturgi dari Goffman `digunakan untuk menjelaskan bagaimana relasi praktek adat dan Islam dijalankan secara bersamaan di Kasepuhan Ciptagelar. Selain secara administratif memeluk Islam, berbagai simbol Islam juga hadir di Ciptagelar; mushola, anak-anak mengaji juga beberapa ritual adat termasuk Tutup Nyambut untuk merayakan akhir masa tanam yang menggunakan doa dalam dua bahasa sekaligus; Sunda dan Arab. Hal ini mirip dengan yang dilakukan oleh penduduk Kendahe di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang menggunakan doa menurut Islam sebagai pembuka acara komunal, dan menutup acara dengan doa sesuai ajaran Kristiani (Widiyanto, 2012). Dalam struktur adat *kasepuhan* selain ada Ki Karma selaku dukun adat, terdapat Ki Amil, salah satu pembantu Abah, pemimpin adat yang bertugas mengurus masalah yang terkait dengan agama. Beberapa bukti ini menunjukkan kecenderungan untuk menjaga harmoni atau keseimbangan, tidak hanya dengan alam sekitar, namun juga dengan masyarakat di luar adat serta negara.

Pada sisi lain, meski Islam dan berbagai simbolnya hadir dalam kehidupan sehari-hari di Kasepuhan Ciptagelar, namun upaya untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak mengganggu eksistensi adat juga terasa kuat. Mang X, salah satu pemuda Ciptagelar dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan antara Ciptagelar dengan beberapa kampung luar adalah bahwa warga Ciptagelar sebagai *lembur jero* adalah pemeluk adat, sedangkan yang diluar lebih dominan agama (Islam). Sebagai Muslim, anak-anak di Ciptagelar biasanya tetap akan belajar shalat dan mengaji di mushola, namun saat *akil baligh* biasanya hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi. Tidak ada shalat berjamaah yang secara rutin dilakukan oleh orang dewasa, termasuk shalat Jumat sehingga

mereka yang ingin melaksanakan Shalat Jumat harus berjalan ke kampung lain.

Demikian juga apabila secara bersamaan ada ritual atau acara adat yang bersamaan dengan waktu shalat makan yang diikuti adalah ritual adat. Tradisi upacara perkawinan juga menjelaskan bagaimana adat berperan cukup dominan, dimana setelah menjalani serangkaian ritual menurut tata cara Islam dan negara, pengantin yang disahkan oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) harus mendapatkan restu dan “pengesahan” dari *abah* selaku pemimpin adat untuk benar-benar dianggap sah sebagai suami-istri. Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan adat di Kasepuhan Ciptagelar karena syarat untuk dapat mengerjakan sawah sendiri dan melakukan praktek pertanian mandiri adalah pada saat seseorang telah menikah (Asep, 2018). Hal ini secara jelas menunjukkan bagaimana kecenderungan untuk menempatkan ajaran adat sebagai prioritas daripada praktek agama Islam yang secara administrative dipeluk oleh warga Ciptagelar. Penerimaan Islam di Ciptagelar diyakini telah berlangsung ratusan tahun dan merupakan “*identity construction*” dari hasil interaksi dengan kelompok Islam yang dominan sejak runtuhnya Pajajaran karena menguatnya Kesultanan Banten dan Demak, hingga proses “menjaga keseimbangan” serta hubungan baik dengan kelompok Islam mayoritas yang tinggal di sekitar Ciptagelar (Widiyanto, 2019;138). Lebih jauh, mengacu Goffman, menampilkan simbol Islam di panggung depan, dan tetap menjaga adat di belakang merupakan strategi non-kekerasan untuk tetap menjaga eksistensi *tatali paranti karuhun* itu sendiri.

Pariwisata Sebagai Jalan Tengah

Tekanan yang datang terhadap masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar tidak hanya terkait dengan spiritualitas yang bertumpu pada ajaran leluhur saja, namun juga pada hak atas tanah ulayat yang bersinggungan dengan wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak sejak pertama kali ditetapkan pada 1992. Terlebih, saat perluasan kawasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi 113.000 ha pada 2003, hampir seluruh wilayah

pemukiman, pertanian dan hutan adat masuk dalam klaim hutan negara (Widiyanto 2019; 101). Pada sisi lain, tanah adat berperan penting dalam tumbuhnya berbagai praktek budaya pada masyarakat agraris seperti Kasepuhan Ciptagelar, sehingga pada saat akses terhadap tanah ulayat berkurang, praktek hidup dan spiritualitas berlandaskan *tatali paranti karuhun* juga akan terancam. Bisa dikatakan, adat tumbuh diatas tanah ulayat, tanpa tanah adat pelan-pelan adat juga akan lenyap.

Sejak tahun 2004, berbagai upaya telah dilakukan oleh warga *kasepuhan* untuk menegaskan eksistensi ada maupun memperkuat akses terhadap tanah adatnya. Bergabung ke dalam kelompok sipil masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pernah dipilih oleh pemimpin adat sebelumnya, *Abah Anom*, sebagai sarana untuk memperjuangkan pengakuan atas tanah ulayat Kasepuhan Ciptagelar secara legal sampai beliau meninggal dunia pada tahun 2007. Strategi ini dianggap tidak terlalu efektif serta tidak mencerminkan sikap “menjaga harmoni” dengan berbagai pihak, termasuk negara yang selama ini menjadi prinsip hidup warga *kasepuhan*. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya kemajuan hingga tahun 2015-an, dan warga *kasepuhan* tetap ditempatkan sebagai penduduk illegal di kawasan konservasi.

Pada sisi lain, berbagai praktek adat yang tetap terjaga ternyata menarik banyak orang untuk datang ke Ciptagelar, selain untuk menikmati alam pegunungan yang tersembunyi dari hirup pikuk kota. Awalnya kedatangan orang luar ke Ciptagelar adalah karena alasan spiritual dimana *Abah Anom*, pemimpin adat sebelumnya juga dikenal sebagai guru spiritual serta memiliki kedekatan dengan beberapa *public figure* dari Jakarta maupun Bandung. Berawal dari kedatangan para tamu “generasi pertama” ini kemudian kabar tentang adanya “surga tersembunyi” dibalik pegunungan Halimun juga mulai tersebar dari mulut ke mulut. Tidak hanya alam yang masih asri, budaya Sunda yang masih terjaga melengkapi *cultural landscape* Ciptagelar sebagai sumber daya pariwisata.

Sumberdaya wisata budaya yang menjadi dayatarik pengunjung dari luar selain *image* tentang adanya kelompok masyarakat Sunda yang tinggal di pegunungan Halimun serta mengenakan pakaian dan tinggal rumah tradisional juga karena menyimpan padi di *leuit* (lumbung padi) dari kayu dan beratapkan ijuk menjadi ciri khas dari Kasepuhan Ciptagelar. Hal ini melengkapi berbagai upacara adat yang terhubung dengan siklus pertanian padi huma kemudian ditempatkan sebagai sarana bagi masyarakat Jawa Barat di perkotaan untuk mempertautkan diri dengan akar budaya Sunda yang sudah mulai menghilang di kawasan urban. Inilah yang menjadikan Kasepuhan Ciptagelar tiba-tiba menjadi magnet baru bagi pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri untuk datang karena dipicu oleh berbagai alasan budaya, fotografi, wisata alam hingga untuk keperluan penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata setiap minggu ada sekitar 50 pengunjung yang datang dan menginap di Kasepuhan Ciptagelar, dan terdistribusi ke beberapa rumah warga selain di Imah Gedhe, rumah besar tempat tinggal pemimpin adat.

Pada sisi lain, prinsip hidup yang cukup “akomodatif” terhadap masuknya hal baru dari luar, termasuk menerima Islam secara administratif juga ditunjukkan oleh Kasepuhan Ciptagelar terhadap datangnya kegiatan pariwisata. Meskipun beberapa warga, termasuk pemimpin adat, Abah Ugi secara tegas menyatakan bahwa Ciptagelar bukanlah destinasi wisata ataupun sebuah desa wisata, namun berbagai kegiatan yang dapat dikatakan sebagai wisata tidak dapat dihindari, sampai saat pandemik Covid19 membuat kedatangan pihak luar ke Ciptagelar dibatasi. Meski demikian, seperti halnya strategi menerima Islam secara administratif di panggung depan dan mempraktekkan adat dalam kehidupan sehari-hari sebagai prioritas, kedatangan pariwisata serta wisatawan ke Ciptagelar tetap dalam koridor dibawah kontrol otoritas adat sehingga eksistensi aturan adat tetap terjaga. Ini tercermin dalam pernyataan Abah Ugi sebagai pemimpin adat bahwa hal baru, termasuk kegiatan wisata, teknologi informasi, komunikasi hingga listrik ramah lingkungan

dengan *micro-hydro* bisa diterima selama tidak merusak adat serta memberi manfaat kepada masyarakat *kasepuhan*. Menjaga adat agar tetap sesuai tatanan selain menjadi kunci bagi eksistensi masyarakat adat, juga bisa menjadi kapital bagi berbagai pengembangan kegiatan wisata budaya di Kasepuhan Ciptagelar. Merujuk MacCannel (1973), keaslian atau otentisitas budaya adalah tulang punggung wisata budaya sehingga hilangnya keaslian bisa akan diikuti oleh lenyapnya modal terpenting dari daya tarik atau kegiatan wisata budaya.

Salah satu upacara adat yang kemudian saat ini berkembang menjadi kegiatan wisata penting tidak hanya bagi warga *kasepuhan*, namun juga pemerintah daerah adalah Seren Taun. Upacara ini adalah salah satu ritual terpenting untuk menutup siklus menanam padi huma secara tradisional bagi masyarakat *kasepuhan* sekaligus untuk mengucapkan rasa terimakasih syukur dan persembahkan kepada Dewi Pohaci, sang dewi padi. Diselenggarakan satu tahun sekali, ritual ini tidak hanya dihadiri warga *kasepuhan* di *lembur jero* Ciptagelar, namun juga perwakilan dari warga *kasepuhan* dari *lembur luar* yang tinggal beberapa wilayah kabupaten sekitarnya, termasuk di Provinsi Banten. Pesta panen ini biasanya berlangsung selama beberapa hari dengan menampilkan beberapa atraksi kesenian tradisional seperti wayang, jaipong hingga pentas musik modern yang kemudian ditutup dengan ritual sakral untuk memasukkan padi hasil panen ke lumbung komunal yang dikeramatkan; *Leuit Si Jimat*.

Ribuan pengunjung baik warga adat, pedagang berbagai komoditas, wisatawan, perwakilan pemerintah, media massa hingga peneliti hadir ke Ciptagelar dan menginap di rumah tradisional penduduk yang ditunjukkan serta menjadi semacam “homestay” dadakan. Di sini, meskipun tidak ada “tarif” resmi yang ditetapkan, namun seperti halnya fungsi industri akomodasi pendukung pariwisata, para pengunjung yang menginap akan memberikan pengganti uang makan dan menginap bagi tuan rumah. Secara ekonomi, aktifitas “wisata” selama Seren Taun maupun kedatangan pengunjung secara reguler di hari biasa mampu memberikan alternatif pendapatan bagi warga

lokal sebagai penyedia jasa akomodasi, pemandu serta terkadang transportasi untuk antar jemput pengunjung di kota terdekat, Pelabuhan Ratu atau Ciselok. Pada perkembangannya, kehadiran berbagai souvenir lokal seperti *t-shirt* dengan motif Ciptagelar, kopi maupun berbagai kerajinan lokal melengkapi nuansa pariwisata di kampung adat Kasepuhan Ciptagelar.

Perkembangan aktifitas wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam di Ciptagelar pada titik puncaknya mampu memediasi berbagai kebakuan komunikasi antara warga *kasepuhan* dengan pihak luar, termasuk masyarakat yang selama ini menganggap bahwa penduduk kasepuhan penganut animisme serta dengan pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Meningkatnya mobilitas orang luar yang datang untuk sekedar “melihat” Ciptagelar, mengantarkan pengunjung hingga berdagang sedikit mampu membongkar *stereotype* kurang baik terhadap warga *kasepuhan* tersebut. Orang luar akhirnya melihat bahwa di Ciptagelar juga ada mushola bagi siapapun yang ingin bersembahyang atau anak-anak mengaji setiap selepas magrib bersamaan dengan praktek adat yang terjaga.

Hal ini sedikit banyak mampu menghadirkan penerimaan tentang apa yang dipilih dan dijalankan oleh warga *kasepuhan*. Peningkatan jumlah pengunjung ke area Ciptagelar, baik di hari biasa dan terutama saat Seren Taun juga menjadikan Kasepuhan Ciptagelar serta berbagai kegiatan adatnya salah satu destinasi penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Seren Taun juga kemudian dimasukkan ke dalam kalender resmi kegiatan wisata budaya, termasuk berbagai upaya untuk mempromosikan kepada pihak luar. Demikian pula pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang sebelumnya sempat menyebut penduduk Kasepuhan Ciptagelar sebagai warga ilegal di kawasan konservasi, justru menjadikan Kasepuhan Ciptagelar sebagai aset wisata budaya bagi pihak taman nasional. Lebih jauh, pada saat upacara Seren Tahun 2016, perwakilan pihak taman nasional yang datang secara langsung menyatakan bahwa kawasan Ciptagelar telah dimasukkan sebagai “kawasan pengembangan

khusus” untuk kegiatan wisata budaya dan pendidikan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai penghuni ilegal.

Beberapa bukti di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat, termasuk Kasepuhan Ciptagelar hanya pasif dalam merespon berbagai tekanan yang datang dari luar. Di Ciptagelar, pariwisata tiba-tiba hadir sejak sekitar tahun 2008-an sebagai jalan tengah untuk bernegosiasi dengan tekanan terkait tradisi berdasarkan adat maupun upaya memperkuat klaim atas tanah ulayat yang sudah ditinggali leluhur *kasepuhan* sejak ratusan tahun silam dan tiba-tiba dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara. Meskipun saat dikonfirmasi langsung ke kantor balai taman nasional pihak TNGHS menyatakan belum ada dokumen resmi apapun yang telah terbit untuk mendukung pernyataan pihak TNGHS di tahun 2016, namun hal tersebut tetap saja merupakan kemajuan penting bagi upaya penduduk Kasepuhan Ciptagelar untuk mendapatkan pengakuan atas tanah ulayatnya serta rasa nyaman tinggal di area hutan taman nasional. Disini, meskipun keterlibatan yang semakin intensif dengan kegiatan pariwisata tentu saja memiliki beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan, namun dengan menunjukkan bahwa pariwisata berperan menjadi jalan tengah untuk menegosiasikan kepentingan untuk mempertahankan identitas budaya yang bersumber dari *tatali paranti karuhun* serta memperkuat klaim untuk tinggal di tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur *kasepuhan*.

III. SIMPULAN

Eksistensi adat yang bertumpu pada *tatali paranti karuhun* dan hak atas tanah ulayat yang telah ditinggali secara turun temurun oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar telah terancam oleh berbagai upaya pemurnian agama dari kelompok mayoritas serta penetapan wilayah adat sebagai bagian dari kawasan konservasi. Selain dianggap sebagai penghuni ilegal di tanah adatnya sendiri, penduduk Ciptagelar kerap dianggap sebagai muslim yang tidak utuh sehingga menjadi target rutin upaya pemurnian Islam oleh kelompok Islam mayoritas.

Bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan pariwisata sebagai sektor ekonomi strategis, pengembangan wisata di Ciptagelar mampu menjadi jembatan sekaligus alat negosiasi terhadap tekanan dari luar tersebut. Berbagai kegiatan budaya, khususnya ritual Seren Taun justru diterima oleh masyarakat luar sebagai atraksi tarik wisata dan menetralkan segregasi antara Islam dan adat. Lebih lanjut, dianggap memiliki potensi wisata penting, Ciptagelar telah ditetapkan sebagai area khusus pengembangan wisata dalam kawasan taman nasional. Meski demikian, dibutuhkan *political will* dan *policy will* dari negara untuk mengakomodir secara legal keberadaan masyarakat adat di kawasan konservasi, termasuk Kasepuhan Ciptagelar selama selaras dengan tujuan dari taman nasional yaitu konservasi, edukasi serta pengembangan wisata.

REFERENSI

- Achmad, S. W, 2017; *Sejarah Islam di Tanah Jawa: mulai dari masuk hingga perkembangannya*. Araska Publisher.
- Adimihardja, K, (1992; *Kasepuhan yang tumbuh di atas yang luruh: pengelolaan lingkungan secara tradisional di kawasan Gunung Halimun, Jawa Barat*. Tarsito.
- Bird-David, N. (1999). "Animism" revisited: personhood, environment, and relational epistemology. *Current anthropology*, 40(S1), S67-S91.
- Darjanto, B, 2015; Pola Tanam Padi dan dampaknya terhadap Ketahanan Pangan Pokok (Studi pada Masyarakat Adat Banten Kidul Kasepuhan Ciptagelar di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi), *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada.
- Dove, M., 1985; *Peranan kebudayaan tradisional Indonesia dalam modernisasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Goffman, E., 1990; *The presentation of self in everyday life*. London: Harmondsworth. (Reprinted, London: Penguin Books 1990).
- Henley, D. and Davidson, J.S. (2008). In the name of adat: regional perspectives on reform, tradition, and democracy in Indonesia. *Modern Asian Studies*, pp.815-852.
- Kusdiwanggo, S. (2016). Konsep Pola Permukiman Spasial di Kasepuhan Ciptagelar. *Jurnal Permukiman*, 11(1), 29-42.
- Li, T.M. (2000). Articulating indigenous identity in Indonesia: Resource politics and the tribal slot. *Comparative studies in society and history*, 42(1), pp.149-179.
- MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. *American journal of Sociology*, 79(3), 589-603.
- Mutaqin, Z. Z. (2014). Penghayat, orthodoxy and the legal politics of the state: The survival of agama djawa sunda (madraisism) in indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 42(122), 1-23.
- Peluso, N.L. and Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), pp.761-812.
- Picard, M, 1996; *Bali. Cultural tourism and touristic culture*.
- Pringle, R, 2010; *Understanding Islam in Indonesia: politics and diversity*. University of Hawai'i Press.
- Reid, A, 1993; *Southeast Asia in the age of commerce 1450-1680: Volume 2: Expansion and crisis*. New.
- Ricklefs, M. C, 2012; *Islamisation and its opponents in Java: A political, social, cultural and religious history, c. 1930 to the present*. Singapore: NUS Press.
- Saepudin, A, 2018; Agama dan Kedaulatan Pangan: Memaknai Ulang Praktik Pertanian serta Hubungan antara Manusia dan Lingkungan (Studi Kasus Masyarakat Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat), *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada.
- Schulte Nordholt, H. G. C, 2007; *Bali an Open Fortress 1995-2005. Regional autonomy, electoral democracy and entrenched identities*.
- Spradley, J. P., Elizabeth, M. Z., & Amirudin. ,1997; *Metode etnografi*. Tiara Wacana Yogya.
- Steenbrink, K. A. (2005). A Catholic sadrach: the contested conversion of Madrais adherents in West Java between 1960-2000. *Een vakkkracht in het koninkrijk*, 286-307.

- Suganda, Ugis, Komunitas Adat Ciptagelar: Membangun Posisi Tawar Hak Atas Hutan Adat in Emilianus Kleden, Liz Chidley, and Yuyun Indradi (eds), 2013; *Hutan Untuk Masa Depan; Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) and Down to Earth.
- Susilo, J, 2016; Spiritualitas dalam Khazanah Budaya Jawa: mencari jalan suci dalam Serat Centhini. *Research Report*, 671-677.
- Widiyanto, N., & MA, P. 2012; *Berlindung di Balik Mitos: Mitos Maslihe dan Adaptasi Kultural Penduduk Kendahe, Kepulauan Sangihe Terhadap Bahaya Letusan Gunung Awu* (Master thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Widiyanto, N., 2019; Indigenous Religion and Tourism Development in Indonesia and Malaysia, *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada.
- Widiyanto, N., & Agra, E. (2019). Tourism Development and the New Path of Migration in Sabah, Malaysia. *Borneo Research Journal*, 13, 81-97.